

STRATEGI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BENGGKULU

Fedo Arliansyah Ramadhan
NPP. 31.0277

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 31.0277@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: David Erwin Mayor, S. Sos, MBA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by the strategic level of women's representation in legislative institutions in supporting women's empowerment in Bengkulu City. Women's representation in the legislature based on its duties and functions, namely supervising every women's empowerment program with strategies that emerge from each person's representation of women in the legislature. **Purpose:** The aim of this research is to determine and analyze strategies for women's representation in the legislature in supporting women's empowerment programs in Bengkulu City. **Method:** This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Apart from that, the researchers' data sources are people, places and documents with the data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of strategic analysis according to Geoff Mulgan. **Results/Findings:** Strategy, Purpose, Environment, Direction, Action, Learning can show that there is full support from women's legislative representation as proven by programs that are running well, even though some are hampered by the lack of properly allocated budgets in the relevant agencies. **Conclusion:** Strategy for women's representation in the legislature to support women's empowerment programs in the city of Bengkulu. The supporting factor in the strategy of representing women in the legislature in supporting women's empowerment programs in the city of Bengkulu is the full support of female council members. Meanwhile, the limiting factor is inadequate budget availability.

Keywords: Women's Representation, Empowerment, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. keterwakilan perempuan di legislatif berdasarkan tugas dan fungsi nya yaitu mengawasi setiap program pemberdayaan perempuan dengan strategi yang muncul dari setiap pribadi masing2 keterwakilan perempuan yang ada di legislatif. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu, sumber data peneliti adalah orang, tempat dan dokumen dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori analisis strategi menurut Geoff Mulgan. **Hasil/Temuan:** Strategi tujuan (purpose), lingkungan (environment), pengarahan (direction), tindakan (action), pembelajaran (learning) dapat memperlihatkan bahwa adanya dukungan penuh dari keterwakilan perempuan dilegislatif terbukti dengan program-program sudah berjalan dengan baik, meskipun beberapa terhambat oleh kurang teralokasikan dengan baik anggaran yang ada di dinas terkait. **Kesimpulan:** Strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari implementasi program perempuan disetiap sektor dapat diperkuat sehingga keterwakilan perempuan di legislatif dapat menjadi sarana strategis untuk mengadvokasi kebijakan dan program yang mendukung perempuan.

Adapun faktor pendukung pada strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu adalah dukungan penuh dari anggota dewan perempuan. Sedangkan faktor pengambatnya yaitu ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Pemberdayaan, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DPRD memegang peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya terbatas pada aspek teknis atau administratif, tetapi juga memiliki dimensi politis. DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan bahkan melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks politik lokal, peran DPRD dalam merancang strategi sangat penting, terutama terkait dengan isu-isu seperti pemberdayaan perempuan. Keterwakilan perempuan di DPRD merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan diberikan perhatian yang memadai di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan peran serta dampak positif perempuan dalam politik lokal.

Strategi peningkatan keterwakilan perempuan adalah respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi serta pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang terwakili di lembaga legislatif, diharapkan implementasi program pemberdayaan perempuan di berbagai sektor dapat diperkuat. Terlibatnya perempuan dalam proses legislasi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Ini dapat membantu mengubah pandangan sosial dan budaya di masyarakat, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, dan mencapai tujuan kesetaraan gender dengan lebih efisien.

Pentingnya keadilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk, terutama perempuan, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan yang memerintahkan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk menerapkan PUG dalam penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tantangan pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu melibatkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan diatasi guna mencapai kesetaraan gender serta peningkatan kesejahteraan perempuan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk akses terbatas terhadap pendidikan karena adanya hambatan yang dapat menghambat perkembangan potensi dan keterampilan perempuan, rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mengurangi suara dan pengaruh perempuan dalam merumuskan kebijakan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan seperti lembaga legislatif atau eksekutif, serta masalah kekerasan dan ketidakamanan gender baik di ruang publik maupun di dalam rumah tangga, yang dapat menjadi ancaman serius terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 tahun 2018 mengatur mengenai pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak-anak.

Strategi utama yang diadopsi oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga guna mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Namun, di lapangan masih terdapat kekurangan dalam implementasi strategi tersebut, yang terbukti dengan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, dengan rincian 3.838 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus dilaporkan ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus dilaporkan ke Badan Peradilan Agama (BADILAG).

1.3 Penelitian Terdahulu

Siti, Aminah An d Sri, Wahyuni A nd Emmy, Solina (2022) berjudul Strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD kota tanjungpinang menyebutkan bahwa peran partai politik sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Peran tersebut tercermin dalam berbagai strategi yang diadopsi oleh partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Strategi-strategi ini dibangun melalui pendekatan organisasi perempuan, pendekatan tokoh masyarakat, pendekatan program pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terbatat kendala. Salah satunya berupa adanya keterbatasan anggaran dalam membuat sebuah program sehingga membuat DPRD Kota Tanjungpinang perlu pengkajian yang signifikan dalam membuat program prioritas yang akan dilaksanakan.

Kedu, Loisa De Marilak Gendi (2023) berjudul Strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dprd kabupaten ngada provinsi nusa tenggara timur pada pemilu tahun 2024 menyebutkan bahwa Adanya faktor penghambat yang menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di masyarakat Ngada, terutama terkait rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, kondisi ekonomi para politisi perempuan, dan proses kaderisasi yang belum maksimal, adalah tantangan nyata yang perlu diatasi. Namun, strategi yang digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu tahun 2024 yang berjalan sesuai dengan konsep neo-ibuisme dapat menjadi langkah positif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Ferdita Aprilia (2014) berjudul Strategi pemberdaya an calon anggota legislatif perempuan dalam kampanye pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh dewan pimpinan daerah partai demokrat provinsi lampung menyebutkan bahwa strategi pemberdayaan perempuan oleh DPD Partai Demokrat melalui tiga aspek. Pertama, strategi pencapaian kemandirian sudah dilaksanakan melalui pengembangan potensi perempuan namun masih dinilai belum efektif. Kedua, strategi peningkatan partisipasi terlihat melalui adanya kesempatan yang diberikan partai kepada kader perempuan untuk ikut dalam pencalonan di legislative namun belum diiringi dengan dukungan dan peran aktif partai untuk perempuan di partai politik. Ketiga, adalah strategi peningkatan kesetaraan gender yang masih belum bisa dilaksanakan di DPD Partai demokrat terlihat melalui adanya kesenjangan mengenai kedudukan perempuan di partai.

Dhita Kusuma Wardani, S.Tr.Ip. (2022) berjudul Peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di kota bengkulu menyebutkan bahwa DPD Partai Demokrat memiliki strategi pemberdayaan perempuan melalui tiga aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut yaitu Strategi Pencapaian Kemandirian, Strategi Peningkatan Partisipasi dan Strategi Peningkatan Kesetaraan Gender.

Alrdi Samsa (2021) berjudul Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka) menyebutkan bahwa strategi politik perempuan didasarkan pada aspek identitas kelompok dan ikatan gender.

Rahayu, L. F. (2023). berjudul Pendidikan Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Di Provinsi Banten (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas calon perempuan bukanlah suatu pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun merupakan suatu proses yang panjang dan berkesinambungan. Upaya inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Keagamaan dan Masyarakat. BPPMD berupaya semaksimal mungkin agar ada dana APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan (Gender budgeting). Namun harus disadari masih terdapat keterbatasan dalam berbagai hal.

Adelina, N. Y. (2016) berjudul Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 menyebutkan bahwa keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Alfian Zakaria (2021) berjudul Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa anggota legislatif di sampang telah cukup berhasil menginisiasi produk hukum berupa peraturan daerah yang memiliki perhatian pada aspirasi-aspirasi perlindungan hak-hak perempuan.

Tiara Navy Argawidyanti (2022) berjudul Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program 'Sekoper Cinta' di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, yaitu dengan edukasi bagi 100 kaum perempuan di Desa Cimuja melalui sosialisasi terkait keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program 'Sekoper Cinta' Provinsi Jawa Barat ini berjalan dengan baik dibuktikan dengan antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi. Diharapkan program serupa dapat dilakukan pada daerah lain agar kesetaraan gender dapat terwujud secara nasional.

Andi Aulia Nabila (2019) berjudul Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik menyebutkan bahwa berdasarkan fakta bahwa nyatanya pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33,6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17,86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemen.

Astuti, P. (2015). berjudul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Koalisi Perempuan Indonesia (Kpi) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang menyebutkan bahwa Peran KPI Semarang dalam pemberdayaan perempuan melalui LSM dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk ikut mengembangkan kemandirian. Di sinilah peran KPI Semarang sebagai wadah belajar dan menjadi motivator bagi perempuan untuk berorganisasi dan berpolitik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian merupakan masalah khusus yang terjadi di

lokus penelitian yaitu strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengatui kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung yang kemudian dideskripsikan melalui kata – kata dan bahasa sesuai dengan metode ilmiah. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”.

Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009:19) yaitu purpose (tujuan), Environment (Lingkungan), direction (Pengarahan), Action (Tindakan) dan Learning (Pembelajaran).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di kota bengkulu

3.1.1 Purpose (Tujuan)

Tujuan adalah alasan hadirnya suatu kebijakan dari strategi yang dilaksanakan. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam

menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu mempunyai tujuan yang ingin dilaksanakan. Perempuan mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyeimbangkan haknya dengan perempuan lain. Sebagai anggota legislatif maka perlunya membuat perempuan semakin lebih bersemangat untuk dapat mendorong dan menciptakan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya itu saja perempuan juga harus dapat melawan tindak kejahatan yang dilakukan kepada dirinya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberanian dalam diri perempuan dan menunjukkan jika perempuan itu bukannya kondisi dia lemah dan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan program yang diciptakan oleh perempuan di DPRD dan instansi berkaitan mampu dilaksanakan dengan cukup baik. Setiap individu mampu melaksanakan tugasnya. Setiap individu juga dapat memberikan bukti nyata bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan sosial perempuan. Setiap anggota mampu melaksanakan tupoksinya dengan sangat baik dan hal tersebut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan setiap program yang dilaksanakan.

3.1.2 Environment (Lingkungan)

Lingkungan adalah faktor penunjang kegiatan yang dilaksanakan pada ruang lingkup legislatif. Untuk menganalisis strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu maka dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dapat dideskripsikan dengan kolaborasi setiap pihak untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dengan didukung lingkungan yang menunjang. Lingkungan dapat membantu melaksanakan program yang direncanakan sebab lingkungan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap berbagai macam program yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kontribusi perempuan pada bidang pemberdayaan perempuan karena setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama sehingga setiap perempuan dapat memberikan bukti jika mereka dapat melaksanakan program dengan baik.

3.1.3 Direction (Pengarahan)

Pengarahan yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan dapat membantu jalannya program agar program terlaksana dengan lancar. "Pengarahan yang diberikan itu dilaksanakan pada saat kerjasama untuk mencapai suatu program agar program dapat berhasil. Setiap pengarahan yang diberikan pasti dimaksudkan untuk dapat memantau berbagai macam kegiatan. Pengarahan ini dilakukan untuk dapat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program agar program bisa terlaksana dengan sangat baik. Namun, jika pengarahan yang dilakukan jarang dilaksanakan tetapi tidak memungkiri jika pengarahan ini mampu memberikan perubahan terhadap kondisi yang sedang dialami perempuan itu sendiri.

Kemudian dapat diketahui apabila tidak semua masyarakat perempuan mengetahui tentang beberapa hal yang harus dilakukan apabila mereka mengalami masalah contohnya masalah tentang adanya kekerasan seksual, body shaming, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan masalah-masalah lainnya dengan adanya pengarahan sebenarnya mampu menciptakan perubahan supaya masyarakat mempunyai pengetahuan untuk dapat melakukan antisipasi agar berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak dapat terjadi dan mencegah kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

3.1.4 Action (Tindakan)

Tindakan yang dilakukan oleh pemberdayaan perempuan dilaksanakan supaya dapat menciptakan perubahan yang baik terhadap suatu kondisi. Masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan seperti yang disampaikan pada hasil wawancara sebelumnya diantaranya kekerasan seksual, body shaming, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan masalah-masalah lainnya harus cepat ditanggulangi agar masalah ini tidak memberikan dampak yang berkepanjangan. Selain itu, anggota legislatif selalu melakukan tindakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi

di lapangan. Ketika ada masalah di lapangan kami seringkali fokus dengan tindakan yang akan dilaksanakan.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program keluarga berencana. Pada program keluarga berencana ini dapat diketahui apabila ada anggota yang ditunjuk untuk dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran program jadi anggota tersebut harus mampu mengevaluasi program yang dilaksanakan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh para anggota DPR karena pelaksanaan program termasuk dari bagian tanggung jawab yang harus mereka laksanakan.

3.1.5 Learning (Pembelajaran)

Sebuah strategi pasti memberikan Pembelajaran, dalam hal ini DPRD Kota Bengkulu sudah melaksanakan tindakan yang disampaikan pada hasil wawancara sebelumnya. Pembelajaran ini menjadi bentuk upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Bengkulu untuk memberikan keadilan dan kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan. Pembelajaran yang didapatkan oleh DPRD Kota Bengkulu sebelumnya anak masyarakat yang belum tahu tentang cara untuk mencapai tujuan hidup, kemudian kehilangan semangat ketika perempuan menjadi korban kekerasan sehingga solusi yang diberikan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan.

Strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menyusun berbagai macam upaya untuk dapat memberikan keadilan kepada pihak perempuan karena seringkali jika terjadi kejahatan seperti kejahatan seksual maupun pelecehan yang disalahkan selalu pihak perempuan karena dinilai perempuan tidak mampu menjaga diri dan tidak dapat melindungi dirinya dari para pelaku. bentuk evaluasi dari kegagalan yang dialami oleh sebuah program adalah dengan mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan contohnya program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini pasti mempunyai tujuan salah satunya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan populasi agar seimbang dengan kemampuan produksi nasional. Jadi dengan program KB ini dapat membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan melindungi kesehatan ibu dan anak. Dengan keberhasilan program tersebut maka dapat dilihat jika keluarga mampu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya bentuk evaluasi dari kegagalan dalam program ini apabila tidak berhasil maka tujuan yang diharapkan dari program KB tidak dapat terlaksana dengan baik.

Setiap anggota DPR mempunyai tanggung jawab masing-masing sehingga setiap programnya mampu dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak panjang bagi setiap pihak yang berkaitan. Pembelajaran juga dapat menjadi bentuk keterampilan untuk memberikan evaluasi terhadap kelancaran program agar setiap program yang dilaksanakan mampu terlaksana dengan optimal.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Strategi Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Menunjang Program Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah adanya dukungan penuh dari setiap anggota dewan perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah ketersediaan anggaran yang kurang memadai sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang kurang maksimal.

Anggota legislatif selalu memberikan dan mendukung secara penuh pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan. Tapi dari segi anggaran bahwa anggota legislatif memiliki anggaran yang kurang sehingga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk dapat mencukupi anggaran agar dapat menunjang pelaksanaan program yang direncanakan. Sehingga dalam pelaksanaan setiap program harus mampu diketahui upaya pelaksanaannya agar dapat mengukur keberhasilan program tersebut. Sehingga anggaran yang dimiliki benar-benar dialokasikan ke program yang sangat penting dan berpengaruh cukup besar terhadap pemberdayaan perempuan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu dilakukan oleh anggota legislatif Kota Bengkulu masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya berupa adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan setiap program. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Siti dkk (2022) dimana dalam pelaksanaan program masih terdapat kendala dalam anggaran yang membuat DPRD Kota Tanjungpinang perlu pengkajian yang signifikan dalam membuat program prioritas yang akan dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu dengan strategi Tujuan (purpose), Lingkungan (environment), Pengarahan (direction), Tindakan (action), Pembelajaran (learning) sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung pada strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu adalah dukungan penuh dari anggota dewan perempuan dan Komitmen dari partai politik terhadap keterwakilan perempuan dan integrasi agenda pemberdayaan perempuan dalam platform politik mereka menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi legislator perempuan. Sedangkan faktor pengambatnya yaitu ketersediaan anggaran yang kurang memadai sehingga program yang dijalankan belum maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi keterwakilan perempuan di legislatif dalam menunjang program pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu dan Ketua pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Bengkulu serta masyarakat yang terlibat dalam memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adelina, N. Y. (2016). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 222-242.

<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.357>

Aprilia, F. (2014). STRATEGI PEMBERDAYAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN

- 2014 OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG (Doctoral dissertation, FISIP). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3224>
- Argawidyanti, T. N., Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2022). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program 'Sekoper Cinta' di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 95-106. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2899>
- Astuti, P. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 151-160. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/8770/8528>
- Kedu, L. D. M. G. (2023). STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILU TAHUN 2024 (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14301>
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulgan Geoff. 2009. *The Art Of Public Strategi (Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good)*, 19
- Nabila, A. A., & Alfandi, A. (2019). Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik. *Jurnal Legislatif*, 100-117. <https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10223>
- Rahayu, L. F. (2023). Pendidikan Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Di Provinsi Banten (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 817-823. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4851>
- Samsa, A. (2020). Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka). *ARISTO*, 9(1), 93-108. <http://dx.doi.org/10.24269/ars.v9i1.2009>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siti, A., Sri, W., & Emmy, S. (2022). STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). <https://doi.org/10.31629/jmm.v5i2.4162>
- Wardani, D. (2023). PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BENGKULU (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15899>
- Zakaria, A. (2021). Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan:(Studi Analisis Gender dan Politik). *Jurnal Politique*, 1(2), 78-91. <https://doi.org/10.15642/politique.2021.1.2.78-91>

Peraturan

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.